
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN LANJUT USIA (LANSIA) DI DESA
MASNAULI KECAMATAN SIRANDORUNG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**Fadilah Pratiwi Sihotang¹, Asima Yanty S. Siahaan²
Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: fadilapratiwi33@gmail.com¹, asimayantysiahaan@gmail.com²

Abstract: *The Village Fund Policy is an effort by the government to improve village development and community empowerment in the village. One of them is the empowerment of the elderly which is intended so that the elderly can still carry out their social functions to play an active role reasonably in the life of society, nation, and state. The implementation of elderly empowerment in Masnauli village has not been in accordance with Law No. 13 of 1998 concerning Elderly Welfare. This study aims to find out and describe This study aims to describe the implementation of the Village Fund policy in empowering the elderly in Masnauli Village, Sirandorung District, Central Tapanuli Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by interviews, observations and documentation. The results showed that the implementation of the Village Fund policy resulted in the non-achievement of the goal of empowering the elderly, namely the elderly who are healthy, have physical fitness, and have dignity. Its implementation can be seen from four indicators, first communication, coordination carried out by the Masnauli Village government only slightly involving the community in deliberations. Second, the low quality of village apparatus resources because they do not have expertise in the field of village fund management, and the financial resources of village funds owned are insufficient to provide elderly empowerment to all elderly people in Masnauli Village. Third, the low disposition of the level of honesty of the implementor in the presentation of village funds. Fourth, the bureaucratic structure, namely in its implementation, masnauli village does not have a clear SOP or framework.*

Keywords: *Policy Implementation, Village Fund, Elderly Empowerment.*

Abstrak: Kebijakan Dana Desa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa. Salah satunya adalah pemberdayaan lanjut usia (lansia) yang dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi pemberdayaan lanjut usia di desa masnauli belum sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan lanjut usia di Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemberdayaan lansia yaitu lansia yang sehat, memiliki kebugaran fisik, dan bermartabat. Implementasinya dapat dilihat dari empat indikator, pertama komunikasi, koordinasi yang dilakukan pemerintah Desa Masnauli hanya sedikit melibatkan masyarakat dalam musyawarah. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa karena tidak memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan dana desa, dan sumber daya finansial dana desa yang dimiliki tidak mencukupi untuk memberikan pemberdayaan lansia kepada seluruh lansia di Desa Masnauli. Ketiga,

rendahnya disposisi tingkat kejujuran implementor dalam pemaparan dana desa. Keempat, struktur birokrasi yaitu dalam pelaksanaannya Desa masnauli tidak memiliki SOP atau kerangka kerja yang jelas.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pemberdayaan Lanjut Usia.

PENDAHULUAN

Fenomena di dunia yang terjadi saat ini salah satunya adalah fenomena kependudukan, di mana peningkatan jumlah penduduk di Negara Berkembang lebih cepat dibandingkan di Negara Maju. PBB menyebutkan bahwa jumlah penduduk dunia saat ini tercatat sebanyak 7,6 miliar dan akan melonjak menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050.

Banyaknya angka kelahiran daripada angka kematian menyebabkan jumlah penduduk semakin bertambah. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar urutan ke-4 terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat. Berdasarkan hasil Sensus 2010 terdapat pada data Administrasi Kependudukan (Adminduk) jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 237.641.326 dan per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, dengan jumlah 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan.

Peningkatan jumlah penduduk yang sedang dialami ini secara tidak langsung berakibat pada bertambah pula jumlah penduduk lanjut usia. Berdasarkan penelitian kementerian kesehatan tahun 2015, Indonesia mengalami periode populasi menua (aging population), yaitu jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) pada tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) pada tahun 2019, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 48,2 juta jiwa (15,77%) pada tahun 2035. Sebuah Negara dikategorikan dalam populasi menua apabila jumlah penduduk lansia yang berusia 60 tahun mencapai lebih dari 10% dari populasi penduduk.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab I Pasal 1 Lanjut usia (lansia) adalah orang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas yang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU RI No 13 tahun 1998). Penduduk lansia, merupakan bagian dari penduduk secara keseluruhan. Penduduk lansia juga bagian dari perkembangan suatu negara yang masih ingin hidup mandiri, berkarya, bergaul, dihargai, dan bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Lansia tidak ingin bergantung dan menjadi beban bagi masyarakat lain maupun keluarganya, sehingga banyak dari lansia yang masih bekerja keras membanting tulang untuk mencari nafkah, dan masih ada yang tetap bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Kenyataan yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat, bahwa penduduk lanjut usia mengalami kemunduran baik secara fisik maupun secara ekonomi, yang berkaitan dengan kesehatan, produktifitas, fungsi-fungsi biologis, tingkat kejiwaan atau emosi, kontak sosial dengan masyarakat sekitar dan pemenuhan kebutuhan hidup. Banyaknya jumlah penduduk lanjut usia memberi dampak terjadinya masalah-masalah sosial seperti, pengangguran, kemiskinan, dan persaingan hidup yang relatif meningkat.

Masalah yang kerap terjadi pada lansia di Indonesia adalah disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan yang dialami lansia di Indonesia mengakibatkan rendahnya kualitas kesehatan lansia. Hal ini terjadi karena pengabaian terhadap penduduk lansia. Kasus di Desa Blembem, Jawa Timur menunjukkan bahwa tempat tinggal lansia

tidak layak huni dibandingkan dengan jumlah penghuninya. Kasus lansia yang mengalami kemiskinan selanjutnya terjadi di kota Medan dan Pematang Siantar Sumatera Utara. Lansia berusia 72 tahun dan 60 tahun hidup sebatang kara dengan keadaan yang sangat miris, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi. Nyatanya, berkas administrasi sudah dilengkapi dan diberikan kepada kepling namun tidak ada satupun bantuan yang datang.

Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas, sarana/prasarana publik yang tidak memadai, perhatian pemerintah daerah yang kurang, hilangnya nilai-nilai sosial budaya, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penyebab masalah rendahnya tingkat kesehatan lansia di Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan kesakitan dan kematian, penurunan kualitas hidup, peningkatan biaya kesehatan, serta kemunculan beragam masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan lansia di Indonesia masih rendah dari segi kesehatan fisik lansia khususnya di daerah pedesaan.

Desa Masnauli merupakan desa yang 15% masyarakatnya adalah masyarakat lanjut usia (lansia). Rendahnya kemampuan fisik dan materi yang dialami penduduk lansia membuat lansia sulit untuk mendapatkan penghasilan dan biaya pengobatan. Mayoritas lansia di desa ini masih tinggal dengan keluarga bahkan masih ada lansia yang menjadi kepala keluarga dengan mata pencaharian mayoritas bertani. Lansia yang tinggal bersama dengan keluarga tidaklah menjamin tingkat kesakitan lansia menjadi rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat produktif di Desa Masnauli yang mengakibatkan penyerapan tenaga kerja juga rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh keluarga apalagi untuk

membiayai perobatan orangtuanya yang usia lanjut.

Oleh karena itu, Desa Masnauli menerapkan kebijakan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Pasal 7 bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 huruf e bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan adalah dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.

Dengan demikian, Desa Masnauli melaksanakan program Pemberdayaan lansia yang dilaksanakan untuk menangani masalah kesehatan penduduk lanjut usia melalui pelayanan kesehatan posyandu lansia, menjadwalkan senam sehat rutin kepada lansia dengan pakaian dan sepatu olahraga yang telah diberikan. Kegiatan ini berupaya untuk mengontrol keadaan penduduk lansia serta memberikan bimbingan kepada lansia dalam merawat dan memantau keadaan kesehatan lansia, sehingga meningkatkannya kualitas hidup lansia yaitu bisa hidup mandiri, mampu mendapatkan penghasilan, tidak mudah sakit, dan tidak perlu mengurangi arus makanan dalam rumah tangga serta tidak bergantung pada orang lain atau keluarga, dengan kata lain lansia di Desa Masnauli dapat menikmati masa tuanya. Tujuan program kesehatan lanjut usia ini adalah meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia agar tetap sehat, mandiri dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi

dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan lansia di Desa masnauli. Maka dalam penelitian ini, Penulis mengambil judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) di Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis, akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu, berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat. Menurut pendapat Sugiyono (2019:9) adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta penelitiannya lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan permasalahan secara akurat melalui fakta dan menggabungkan informasi atau data dari lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Masnauli Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Kantor Kepala Desa Masnauli. Adapun informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling agar mendapatkan informasi dan data yang jelas secara fakta. Informan penelitian yang dipilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Bidan Desa, Kader Lansia, dan beberapa masyarakat lansia di Desa Masnauli. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari tahap awal hingga temuan data dilapangan. Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dilakukan dengan teknik yang sama dari sumber yang berbeda dan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) di Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah di deskripsikan secara mendalam menggunakan teori dari Edward III yang terdiri dari empat dimensi, yaitu:

Komunikasi

Komunikasi yang dilaksanakan dalam implementasi pemberdayaan lansia di Desa Masnauli adalah pelaksanaan musyawarah pengkajian keadaan desa di setiap dusun, melakukan musrenbang untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa Masnauli, dan pemerintah desa juga mengadakan rapat koordinasi bersama kader lansia dan Bidan Desa untuk melihat bagaimana kegiatan lansia yang sudah berjalan. Informasi pelaksanaan kebijakan sudah ditransmisikan kepada pelaksana kebijakan dan sudah dilaksanakan. Namun, informasi yang disampaikan kader lansia masih tidak jelas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya mekanisme persyaratan yang jelas untuk mengikuti program pemberdayaan lansia di Desa Masnauli, sehingga kader lansia memberikan informasi berdasarkan pemahamannya sendiri dan menyampaikannya kepada lansia-lansia yang menjadi kerabatnya saja.

Komunikasi yang tidak konsisten dapat dilihat dari kader lansia dalam melaksanakan program pemberdayaan lansia memiliki disiplin yang rendah dan pemahaman tugas serta tanggung jawab yang kurang terkait pendataan lansia sehingga program pemberdayaan lansia ini tidak tersampaikan kepada kelompok sasaran yaitu penduduk lansia di Desa Masnauli.

Disiplin pelaksana program yang rendah dan pemahaman tugas serta tanggung jawab yang kurang menyebabkan informasi mengenai lansia tidak tercatat pada catatan demografis kantor Desa Masnauli sehingga masih ada penduduk lansia yang layak mengikuti program pemberdayaan lansia tetapi tidak ikut serta dalam pemberdayaan lansia. Hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap lansia karena Pemerintah Desa Masnauli tidak membuat dokumentasi data statistik jumlah penduduk lansia yang ada. Informasi mengenai lansia tidak tercatat pada catatan demografis Desa Masnauli, sehingga penduduk lansia yang ada di Desa Masnauli masih ada yang tidak ikut serta dalam pemberdayaan lansia.

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Masnauli terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dalam implementasi kebijakan publik, sumber daya merupakan salah satu hal yang penting untuk melihat keefektifan pengimplementasian kebijakan publik.

Sumber daya manusia yang berperan dalam implementasi kebijakan dana desa pada program pemberdayaan lansia di Desa Masnauli adalah perangkat Desa Masnauli, Bidan Desa dan Kader lansia. Sumber daya manusia perangkat desa tergolong sedikit dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dengan pendidikan terakhir adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta tidak memiliki skill dalam bidang akuntansi yang menjadi syarat dalam pengelolaan dana desa. Keterbatasan

tingkat pendidikan dan keahlian dalam bidang pengelolaan dana desa mengakibatkan aparatur desa belum mampu untuk mengelola anggaran Dana Desa dengan baik, sehingga Desa Masnauli membutuhkan pendampingan oleh pemerintah dalam mengelola dana desa agar alokasi dana desanya terimplementasi dengan baik.

Respon dari informan yang peneliti peroleh mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur desa, Bidan Desa, dan kader lansia sudah cukup baik pada kualitas sumber daya manusia Bidan desanya. Sementara itu, untuk kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan kader lansia masih minim dalam pengelolaan dana desa, aparatur desa lebih mengutamakan pada pembangunan fisik daripada untuk pemberdayaan masyarakatnya dan juga aparatur desa terlihat tidak aktif dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini karena kantor desa yang sering tutup pada jam kerjanya. Aparatur desa terlihat lengkap apabila ada acara-acara besar atau kunjungan pemerintah kabupaten. Aparatur desa tidak aktif datang ke kantor Desa Masnauli sehingga sulit untuk menemui aparatur desa bila ada keperluan. Hal yang terjadi ini juga akan berakibat pada implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan lansia di Desa Masnauli. Ketidakaktifan aparatur Desa Masnauli akan menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan lansia tersendat bahkan tidak berjalan dengan baik.

Selain itu, kualifikasi aparatur desa masih rendah dalam mengelola dana desa karena keterbatasan pendidikan sehingga tidak ada keahlian dalam bidang pengelolaan dana desa yaitu bidang akuntansi. Aparatur desa menjadi bagian dalam organisasi kantor desa seperti hanya formalitas saja agar tidak kosong. Beberapa aparatur desa memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta di pabrik sawit dan ada juga yang berprofesi sebagai guru SD, sehingga aparatur desa tidak fokus dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan lansia di Desa Masnauli.

Adapun kader lansia tidak memiliki dalam melakukan pendataan lansia di Desa Masnauli secara menyeluruh. Lansia Desa Masnauli masih tidak mengetahui adanya program pemberdayaan lansia dari dana desa. Hal ini terjadi karena terbatasnya pendidikan para Kader Lansia sehingga tidak memiliki keahlian dalam melakukan pendataan kepada lansia yang ada di Desa Masnauli. Sumber daya manusia yang minim dan tidak memiliki keahlian dalam pelaksanaan pemberdayaan lansia ini akan menyebabkan implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan lansia di Desa Masnauli tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sumber daya finansial Desa Masnauli diperoleh dari anggaran pemerintah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Desa Masnauli. Pemerintah memberikan anggaran untuk pembiayaan pembangunan Desa Masnauli sebesar Rp. 989.000.000; pada tahun 2021 dan di alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur rapat beton yang di bangun di Dusun III, bantuan pupuk pertanian palawija untuk yang terdampak covid, dan BLT penanggulangan covid.

Anggaran biaya yang diberikan untuk pemberdayaan lansia adalah sebesar Rp.113.000.000; dalam satu tahun untuk 246 jiwa lansia yang terdaftar yang mencakup pada seragam lansia dan sepatu olahraga, pelayanan kesehatan posyandu lansia seperti, makanan tambahan atau susu lansia, pengecekan kesehatan asam urat, kolesterol, dan gula darah, obat-obatan lansia, vitamin untuk lansia dan mencakup pada honor kader lansia di Desa Masnauli. Anggaran dana desa yang dialokasikan tidak mencukupi untuk diimplementasikan kepada seluruh lansia yang ada di Desa Masnauli dengan jumlah penduduk lansia yang ada di Desa Masnauli adalah 702 jiwa. Namun, lansia yang aktif datang dalam pemberdayaan lansia di Desa Masnauli hanya 20-30 orang saja sehingga ditemukan bahwa ada kesenjangan dana bahwa dari jumlah dana

untuk pemberdayaan lansia Rp. 113.000.000; dibagi untuk seragam olahraga, makanan tambahan/susu, pengecekan asam urat, kolesterol, gula darah, obat-obatan lansia, dan honor lansia. Dana untuk seragam lansia untuk 30 orang adalah Rp. 4.500.000; susu lansia jika dihitung untuk 20 jiwa lansia dalam satu tahun adalah Rp. 9.600.000; kemudian biaya untuk alat pengecekan kesehatan lansia Rp. 500.000; obat-obatan lansia tidak dihitung karena obat-obatan sudah diberikan dari puskesmas dan ditanggung oleh BPJS, dan honor untuk 10 orang kader lansia adalah Rp. 21.600.000; dalam satu tahun. Biaya keseluruhan yang digunakan untuk 20 jiwa lansia yang aktif jika dijumlahkan adalah Rp. 36.200.000; dari dana keseluruhan Rp. 113.000.000; sehingga sisa dana desa untuk pemberdayaan lansia tidak diketahui penggunaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan mengatakan bahwa sumber daya finansial dalam pelaksanaan program pemberdayaan lansia di Desa Masnauli masih dikatakan minim jika program pemberdayaan lansia diimplementasikan untuk seluruh lansia yang ada di Desa Masnauli. Namun, jika hanya untuk lansia yang terdaftar saja yaitu sebanyak 246 jiwa lansia dana desa yang telah dialokasikan sudah mencukupi.

Disposisi

Disposisi implementor terkait komitmen implementor dalam pelaksanaan program pemberdayaan lansia dilakukan dengan berupaya memberikan kontribusi dalam menjalankan program ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk faktor-faktor disposisi yang berpengaruh terhadap implementasi menurut Edward III dalam Agustino (2016:159-160) yaitu pemilihan implementor yang berdedikasi belum diterapkan dalam implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan lansia di Desa Masnauli.

Peneliti mengamati bahwa implementor seperti aparatur desa dan kader lansia dipilih bukan berdasarkan dedikasi atau

keahlian yang dimiliki, tetapi karena masih ada hubungan kerabat ataupun saudara sesama suku. Kemudian untuk pemberian insentif kepada implementor juga tidak diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pemberian insentif yang dapat membangkitkan semangat implementor dalam pelaksanaan pemberdayaan lansia tidak ada diberikan, bahkan honor untuk kader lansia saja hanya sebesar Rp. 180.000; per bulannya. Terkait kejujuran implementor dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan lansia masih belum dilakukan terlihat dari tidak adanya dicantumkan alokasi dana desa untuk pemberdayaan lansia secara terbuka kepada umum dan alokasi dana desa untuk pemberdayaan lansia di Desa Masnauli tidak jelas peruntukannya yang terlihat dari ditemukannya ketidaksesuaian anggaran yang diberikan dengan jumlah lansia yang aktif dalam pemberdayaan lansia. Adapun sifat demokratis implementor dalam pelaksanaan pemberdayaan lansia adalah implementor menerima masukan dan saran dari lansia terkait jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk lansia.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, struktur birokrasi pada implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan lansia di Desa Masnauli implementor pentingnya adalah Kepala Desa, Bidan Desa, dan Kader Lansia. Implementor Kepala Desa merupakan sebagai orang yang mengontrol berjalannya pelaksanaan program pemberdayaan lansia di Desa Masnauli. Bidan Desa merupakan implementor yang menjalankan pelaksanaan pemberdayaan lansia untuk melayani penduduk lansia yang mengeluhkan penyakitnya. Bidan Desa Masnauli merupakan bidan yang ditugaskan di puskesmas kecamatan dan ditugaskan untuk membantu segala urusan kesehatan masyarakat yang ada di Desa masnauli yang dibantu oleh kader

lansia yang sudah dipilih oleh Kepala Desa Masnauli. Implementor penting terakhir yang peneliti amati adalah Kader Lansia yang tugasnya adalah melakukan pendataan, memandu senam lansia, dan membantu apa saja yang diperlukan oleh Bidan Desa. Selain itu, Kader Lansia juga yang bertugas dalam mendata lansia di Desa Masnauli untuk memberi informasi bahwa ada dilakukan program pemberdayaan lansia dalam bentuk pemberian fasilitas pelayanan kesehatan untuk lansia dan Kader Lansia sebagai pemandu dalam kegiatan senam lansia yang dilaksanakan setiap minggunya.

Dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kader lansia dalam melaksanakan tugasnya diadakan pelatihan oleh puskesmas kecamatan untuk kader lansia. Hal ini dilakukan karena kader lansia lah yang paling memahami dan mengetahui keadaan dan kebutuhan lansia yang ada di Desa Masnauli sehingga dibutuhkan pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya.

Kader lansia senang dalam melakukan tugasnya untuk membantu lansia, hal ini diketahui karena kader menjadi orang yang paling tahu dan yang dicari lansia di Desa Masnauli ketika ada keluhan penyakitnya yang membuat kader lansia menjadi eksis di masyarakat. Kader lansia mau menjadi kader merupakan menjadi kebahagiaan tersendiri karena selalu dilibatkan dalam acara-acara desa. Para kader merasa bangga dapat berperan di Desanya dan bertemu orang-orang penting sehingga mereka dapat mengunggah foto bersama ataupun status di sosial media yang bagi mereka hal itu adalah suatu kebahagiaan yang dapat disamakan dengan uang.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa tugas-tugas para implementor sudah jelas dan dilaksanakan secara maksimal, namun dalam struktur birokrasi ini tidak ada SOP (Standard Operasional Procedure) tertulis untuk pembagian tugas para implementor yang menyebabkan implementasinya menjadi tidak terstruktur dan program pemberdayaan lansia ini

belum merata ke seluruh lansia di Desa Masnauli. Karena menurut Edward III (dalam Subarsono, 2009:91) mengatakan bahwa tolak ukur dari struktur birokrasi ini adalah Standard Operasional Procedure (SOP) yang dimiliki suatu organisasi dan fragmentasi atau pembagian tugas pada masing-masing anggota. Standard Operasional Procedure (SOP) merupakan acuan kerja yang ada di dalam organisasi dan sangat menentukan kinerja pegawai dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Masnauli, pemberdayaan lansia adalah usaha pemerintah Desa Masnauli dalam memberi daya kepada lansia melalui kegiatan lansia untuk berkumpul dan melakukan posyandu lansia yang dibiayai oleh dana desa agar tumbuh rasa kebahagiaan lansia di Desa Masnauli yang dapat meningkatkan derajat kesehatannya dan bebas dari kesakitan. Namun, belum terimplementasi dengan baik disebabkan oleh Koordinasi yang dilakukan pemerintah Desa memang sudah dilaksanakan, namun ada kesenjangan informasi yang diakibatkan oleh penyebaran informasi yang tidak merata, rendahnya partisipasi masyarakat, dan pendataan lansia yang tidak akurat dan tidak terdokumentasi. Kemudian, sumber daya manusia dan sumber daya finansial Desa Masnauli yang minim yaitu kualitas aparatur Desa Masnauli belum memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan lansia. Kader lansia tidak melakukan pendataan lansia di Desa Masnauli secara menyeluruh dan pendataan yang dilakukan tidak terdokumentasi. Minimnya kualitas SDM disebabkan oleh rendahnya kapasitas dan pengetahuan yang dimiliki aparatur desa dan kader lansia. Sumber daya finansial yang ada di Desa Masnauli sudah cukup baik pada perlengkapan fasilitas aula desa

sebagai wadah dalam pelaksanaan pemberdayaan lansia dan adanya perlengkapan alat kesehatan untuk lansia. Namun, pelaksanaan program pemberdayaan lansia ini tidak menyeluruh kepada semua lansia yang ada di Desa Masnauli karena keterbatasan finansial Desa Masnauli. Disposisi pemerintah Desa Masnauli masih rendah karena komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis pemerintah Desa Masnauli masih belum kuat diterapkan dalam implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan lansia di Desa Masnauli. Terakhir, mengenai struktur birokrasi pemerintah Desa Masnauli yakni memiliki tiga implementor penting dan strategis dalam pelaksanaan program pemberdayaan lansia di Desa Masnauli, yaitu Kepala Desa, Bidan Desa, dan Kader Lansia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Moeloeng, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Skripsi:

- Sihotang, F. Pratiwi. 2022. *Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) di Desa masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah*. Medan : USU.

Regulasi:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Internet :

<https://www.beritasatu.com/nasional/695417/bobby-nasution-prihatin-kehidupan-lansia-kurang-perhatian-dari-pemkot-medan> diakses pada 23 Februari 2021.

<https://sumut.inews.id/berita/miris-nenek-sebatang-kara-di-pematangsiantar-andalkan-air-hujan-untuk-minum> diakses pada 23 Februari 2021.

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/0fc023221965624a644c1111/statistik-penduduk-lanjut-usia-2020.html> diakses pada 24 Agustus 2021.

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190704/4530734/indonesia-masuki-periode-aging-population/> diakses pada 28 Desember 2021